

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN**



**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA
(RANWAL RENJA)
TAHUN 2024**

Jl. Gajah Mada No. 116 Praya 83511
Email: dishub.lomboktengahkab@gmail.com
Website: perhubungan.lomboktengahkab.go.id




KATA PENGANTAR

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2024 ini menyajikan informasi rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang disusun dengan harapan agar program dan kegiatan yang akan dilakukan memiliki hasil yang lebih baik dan terukur, sehingga akan menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Penyusunan Ranwal Renja ini juga dimaksudkan sebagai bahan informasi kinerja SKPD sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Praya, 25 Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,



H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691122 199203 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2021 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kab. Loteng	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.....	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN Lombok Tengah	34
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah	38
3.3 Program dan Kegiatan.....	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	44
BAB V PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rennstra Tahun Anggaran 2022.....	8
Tabel 2.2	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target yang Direncanakan.....	15
Tabel 2.3	Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target yang Direncanakan	19
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.....	22
Tabel 2.5	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	27
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.....	33
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan.....	36
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan berdasarkan Renstra Dishub Prov. NTB.....	38
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Tahun 2023.....	40
Tabel 4.1	Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menjadi salah satu dasar penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) dengan memperhatikan keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis, dan partisipatif politis, perencanaan *bottom-up* serta perencanaan *top-down*.

Menyelaraskan dengan amanat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dikerjakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan cara mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja SKPD adalah untuk menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan strategis jangka pendek SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD. Disebutkan juga bahwa Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun

berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai pedoman rencana kerja yang memuat tentang arah kebijakan, program dan kegiatan, dan hal yang ingin dicapai pada tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Adapun *output* dan *outcome* untuk perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi urusan perhubungan, dengan mempedomani:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu satu tahun ke depan yaitu Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menetapkan program dan kegiatan pembangunan yang strategis dalam waktu satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran RKPD Kabupaten Lombok Tengah dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang telah ditetapkan. Selain itu agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terarah dan terukur sesuai dengan kemampuan Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan yang telah digariskan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra (Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan, serta Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra), Analisis Kinerja Pelayanan, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan Renja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian,
Kaidah-kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
(TAHUN ANGGARAN 2022)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menangani urusan perhubungan dengan jenis pelayanan dasar bidang perhubungan yang meliputi: jaringan pelayanan angkutan jalan, jaringan prasarana angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, penyediaan sumber daya manusia di bidang terminal dan pengujian kendaraan bermotor, serta keselamatan. Seperti yang tertuang pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah memiliki fungsi:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan rencana strategis serta program kerja tahunan di bidang perhubungan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
3. Pengkoordinasian penyusunan RKT, RKA dan Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan;
4. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan program kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggaraan peraturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan dibidang Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, dan Bidang Angkutan;
6. Penyelenggaraan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi tugas-tugas bidang Perhubungan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain baik instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan atau swasta;

8. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, integritas dan sinkronisasi program-program Dinas Perhubungan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
9. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang perhubungan;
10. Pelaksanaan pembinaan manajemen terhadap tugas-tugas bawahan;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perhubungan;
12. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah beserta kewenangannya seperti yang tertuang pada Perbup di atas. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

Jumlah program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 terdiri atas 3 (tiga) program dengan 16 (enam belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah. Adapun jumlah realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 19.520.391.252,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 19.931.119.812,00 atau mencapai 97,94% dan realisasi fisik sebesar 98,74%.

Berikut akan disajikan rekapitulasi pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Thn 2021 (%)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	1	2	3	4	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)			
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)			
2. Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
2.15 Bidang Urusan PERHUBUNGAN - Dinas Perhubungan																								
15.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	30,510,286,974		28,990,226,369	100%	7,755,571,931		896,964,987	1,792,673,331		1,069,206,465		1,142,376,541		896964987		11.120.936.473.010		896964085		
			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi kondisi baik	100%				100%						1,069,206,465		1,142,376,541								
			Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	100%				100%						1,069,206,465		1,142,376,541								
			Persentase layanan administrasi perkantora	100%				100%						1,069,206,465		1,142,376,541								
			Persentase layanan administrasi perkantoran	100%				100%						1,069,206,465		1,142,376,541								
			Persentase sarana prasarana kondisi baik	100%				100%						1,069,206,465		1,142,376,541								
15.15.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertelaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD	0	2,406,975,700		1,993,245,500	18 dokumen	345,522,700		9,091,600	4,530,000	5,985,000	5,985,000		34,552,000		8.36			34552000			
15.15.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen DPA	5 dokumen	240697570	4 dokumen	199324550	1 dokumen	34552270	1 dokumen	9,091,600	0 dokumen	4,530,000	0 dokumen	5,985,000	0 dokumen	14,945,400	1 dokumen	34,552,000	100	100	1	199324550	INF
			Dokumen DPPA	5 dokumen	240697570	4 dokumen		1 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100		1			1			
			Dokumen LK/tp	5 dokumen	240697570	4 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100		1			1			
			Dokumen LKP/LPPD	5 dokumen	240697570	4 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100		1			1			
			Dokumen Profil Perhubungan	2 dokumen	240697570	1 dokumen		1 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100		1				1			
			Dokumen Renja	5 dokumen	240697570	4 dokumen		1 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100		1			1			
			Dokumen RKA	5 dokumen	240697570	4 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100		1			1			
			Dokumen SHP	5 dokumen	240697570	4 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100		1			1			
			Laporan Monev	20 dokumen	240697570	16 dokumen		4 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100		4			4			
			Laporan Triwulan dan Tahunan DAK	25 dokumen	240697570	20 dokumen		5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	100		5				5			
15.15.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertelaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahun SKPD	0	18,850,148,994		13,638,377,969	15 dokumen	4,001,362,101		777,400,194	1,263,756,821	888,331,790	888,331,790		3,938,513,637		95.44			3938513637			
15.15.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	18631416801	48 bulan	13451566869	12 bulan	3969692051	3 bulan	772,408,694	3 bulan	1,255,489,571	3 bulan	879,644,540	3 bulan	999,300,782	12 bulan	3,905,843,587	100	98.42	12	13451566869	INF
15.15.01.2.02.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran, dan Tahunan SKPD	75 dokumen	218732193	60 dokumen	186811100	15 dokumen	31670290	3 dokumen	4,991,500	4 dokumen	8,267,250	4 dokumen	8,587,250	4 dokumen	9,734,050	15 dokumen	31,670,050	100	100	15	186811131	
15.15.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertelaksananya pelayanan administrasi perkantoran	0	95,966,000		0	12 bulan	95,966,000		2,492,500	4,246,500	4,249,500	4,249,500		15,808,000		16.47				15808000		
15.15.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Seragam dinas dan atribut	117 stel	64350000	0 stel	0	0 stel	64350000	0 stel	0	0 stel	0	0 stel	0	0 stel	0	0	0	0	0	0	NAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Laju		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Thn 2021 (%)						
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)			
15.15.01.2.05.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependidikan	Laporan Aset	4 dokumen	15808000	0 dokumen		4 dokumen	15808000	1 dokumen	2,492,500	1 dokumen	4,246,500	1 dokumen	4,249,500	1 dokumen	4,819,500	4 dokumen	15,808,000	100	100	4	15		INF	
			Laporan Kependidikan	15 dokumen	15808000	0 dokumen		15 dokumen		3 dokumen		4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		15 dokumen			100		15				
15.15.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang menunjang urusan	0	6,531,418,585		3,766,415,583	12 bulan	2,489,608,435		47,832,620		50,582,600	129,533,100	129,533,100					11.15		284810120				
15.15.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC Split	4 unit	546727585	2 unit	307548200	2 unit	219155585	2 unit	39,454,420	0 unit	41,867,600	0 unit	110,893,100	0 unit	25,357,800	2 unit	217,572,920	100	99.28	2	307548417		INF	
			ATK	60 bulan	546727585	48 bulan		12 bulan		3 bulan		3 bulan	3 bulan		3 bulan		12 bulan			100		12				
			Infocus	1 unit	546727585	0 unit		1 unit		0 unit		0 unit	0 unit		1 unit		1 unit			100		1				
			Kursi Rapat	49 buah	546727585	30 buah		19 buah		0 buah		0 buah	19 buah		0 buah		19 buah			100		19				
			Kursi tamu	4 set	546727585	3 set		1 set		0 set		0 set	1 set		0 set		1 set			100		1				
			Laptop	7 unit	546727585	4 unit		3 unit		3 unit		0 unit	0 unit		0 unit		3 unit			100		3				
			Mirja Kerja Pejabat Eselon II	1 buah	546727585	0 buah		1 buah		0 buah		0 buah	1 buah		0 buah		1 buah			100		1				
			Mirja Rapat	1 buah	546727585	0 buah		1 buah		0 buah		0 buah	1 buah		0 buah		1 buah			100		1				
			Peralatan kebersihan kantor	60 bulan	546727585	48 bulan		12 bulan		3 bulan		3 bulan	3 bulan		3 bulan		12 bulan			100		12				
			Peralatan listrik dan elektronik	60 bulan	546727585	48 bulan		12 bulan		3 bulan		3 bulan	3 bulan		3 bulan		12 bulan			100		12				
			Printer	12 unit	546727585	9 unit		3 unit		3 unit		0 unit	0 unit		0 unit		3 unit			100		3				
15.15.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	12 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	37905000	3 bulan	5,565,000	3 bulan	8,715,000	3 bulan	10,710,000	3 bulan	12,915,000	12 bulan	37,905,000	100	100	12	37			
15.15.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	201 dokumen	517415150	156 dokumen	383385383	20 dokumen	40992000	10 dokumen	2,813,200	0 dokumen	0	10 dokumen	7,930,000	9 dokumen	18,589,000	29 dokumen	29,332,200	100	71.56	29	383385412			
15.15.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya rehab gedung kantor	0	520,399,320		204,160,000	4 paket	315,089,320		0		305,112,000	8,414,300	8,414,300		313,526,300			99.5		313526300				
15.15.01.2.07.09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Toilet Ruang Sektis	1 buah	14958600	0 buah	0	1 buah	14958600	0 buah	0	1 buah	13,980,000	0 buah	0	0 buah	0	1 buah	13,980,000	100	93.46	1	13		INF	
15.15.01.2.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab	6 unit	505440720	2 unit	204160000	4 unit	300130720	0 unit		4 unit	291,132,000	0 unit	8,414,300	0 unit	4 unit	299,546,300	100	99.81	4	204160299				
15.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan listrik, air dan internet serta pengelola keuangan SKPD	0	958,156,375		517,729,026	12 bulan	285,711,375		26,306,823		26,588,920	21,323,550	21,323,550		91,719,267			30.36		91719267				
15.15.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Air	60 bulan	304420123	48 bulan	172576342	12 bulan	85720123	3 bulan	15,810,823	3 bulan	15,581,920	3 bulan	15,475,550	3 bulan	16,299,974	12 bulan	63,168,267	100	73.69	12	172576402		INF	
			Jasa Internet kantor dan LPTD PKB	60 bulan	304420123	48 bulan		12 bulan		3 bulan		3 bulan	3 bulan		3 bulan		12 bulan			100		12				
			Jasa Listrik	60 bulan	304420123	48 bulan		12 bulan		3 bulan		3 bulan	3 bulan		3 bulan		12 bulan			100		12				
15.15.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya pelayanan umum kantor	12 bulan	44896000	0 bulan	0	12 bulan	28551000	3 bulan	10,496,000	3 bulan	11,007,000	3 bulan	5,848,000	3 bulan	1,200,000	12 bulan	28,551,000	100	100	12	28			
15.15.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	0	1,147,222,000		749,235,233	48 unit	222,312,000		33,841,250		137,856,490	11,369,225	11,369,225		222,292,000			88.67		222292000				
15.15.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan STNK kendaraan dinas	220 unit	1147222000	172 unit	749235233	48 unit	222312000	11 unit	33,841,250	27 unit	137,856,490	0 unit	11,369,225	10 unit	30,225,035	48 unit	222,292,000	100	99.99	48	749235452		INF	
Rata-rata capaian kinerja (%)																97.14%	93.61%									
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2021 (%)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	1		2		3		4		K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
15.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas	0.62 ratio	180,177,262,742		169,227,986,988	0.62 ratio	116,269,475,526	3,516,287,852		3,541,707,829	6,412,550,676	3,389,497,002	3516287852		28.792.783.264.600		3516287852				
			Rasio bendaraan per jumlah penumpang	1:40 ratio				1:40 ratio		6,412,550,676			3,389,497,002										
15.15.02.2.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja Lalu Lintas	0	131,917,130,592		21,682,765,632	12 bulan	103,849,215,176	3,210,999,231		2,858,495,400	3,859,881,239	3,859,881,239			12,903,722,572		11.94		12903722572		
15.15.02.2.02.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Baju Zeta	2 buah	16475790074	0 buah	2710345704	0 buah	12967301897	0 buah	3,200,799,231	0 buah	2,778,295,400	0 buah	3,849,681,239	0 buah	2,964,146,702	0 buah	12,792,922,572	0	98.66	0	
			Layanan Listrik PJU	12 bulan	16475790074	0 bulan		12 bulan		3 bulan		3 bulan	3 bulan	3 bulan			12 bulan		100		12		
			Meteriasi di Kecamatan Batak/Bang utara	1 paket	16475790074	0 paket		1 paket		0 paket		0 paket	0 paket	0 paket			1 paket		100		1		
			Pagar Pengaman Jalan	138 meter	16475790074	90 meter		48 meter		0 meter		48 meter	0 meter	0 meter			48 meter		100		48		
			Penda Pengendalian PJU	1 buah	16475790074	0 buah		0 buah		0 buah		0 buah	0 buah	0 buah			0 buah		0		0		
			Perengkapan Teknisi PJU	1 paket	16475790074	0 paket		1 paket		1 paket		0 paket	0 paket	0 paket			1 paket		100		1		
			Rambu-rambu Lalu Lintas	457 buah	16475790074	357 buah		100 buah		0 buah		100 buah	0 buah	0 buah			100 buah		100		100		
			Sosialisasi Perengkapan Jalan dan Tata Cara Berlalu-lintas	27 kali	16475790074	15 kali		0 kali		0 kali		0 kali	0 kali	0 kali			0 kali		0		0		
15.15.02.2.02.04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Suku Cadang Traffic Light	1 paket	110800000	0 paket	0	1 paket	110800000	0 paket	10,200,000	1 paket	80,200,000	0 paket	10,200,000	0 paket	10,200,000	1 paket	110,800,000	100	100	1	
15.15.02.2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Tarifikasinya penerbitan, pengawasan, dan pengendalian parkir	0	3,715,722,400		2,801,778,600	12 bulan	464,152,000	20,654,000		20,533,500	43,968,000	43,968,000			116,078,000		13.99		116078000		
15.15.02.2.04.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Gembok Parkir	25 buah	928930600	0 buah	700444650	0 buah	116038000	0 buah	20,654,000	0 buah	20,533,500	0 buah	43,968,000	0 buah	30,922,500	0 buah	116,078,000	0	100.03	0	
			Penataan parkir dan terminal di 12 kecamatan	60 bulan	928930600	48 bulan		12 bulan		3 bulan		3 bulan	3 bulan	3 bulan			12 bulan		100		12		
			Perbup Pengendalian dan Penindakan Pelanggaran Parkir	2 buah	928930600	1 buah		0 buah		0 buah		0 buah	0 buah	0 buah			0 buah		0		0		
			Rongpi Parkir	312 buah	928930600	262 buah		50 buah		0 buah		0 buah	0 buah	0 buah			50 buah		100		50		
15.15.02.2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	0	15,731,943,650		9,126,886,750	5500 unit	3,444,636,650	218,594,621		587,720,929	250,874,437	250,874,437			1,114,939,987		19.48		1114939987		
15.15.02.2.05.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Uji Side Slip Tester	1 unit	2798506850	0 unit	1825377350	0 unit	341045450	0 unit	43,694,621	0 unit	250,761,929	0 unit	244,771,807	0 unit	24,750,000	0 unit	563,978,357	0	165.37	0	
			Alat Uji Tint Tester	1 unit	2798506850	0 unit		0 unit		0 unit		0 unit	0 unit	0 unit			0 unit		0		0		
			Kalibrasi Alat Uji	18 unit	2798506850	12 unit		0 unit		0 unit		0 unit	0 unit	0 unit			0 unit		100		0		
			Pembobokan Halaman Kantor UPTD PKB (lanjutan)	5 paket	2798506850	4 paket		1 paket		0 paket		1 paket	0 paket	0 paket			1 paket		100		1		
			Perangkat Smart Card	1 unit	2798506850	0 unit		1 unit		1 unit		0 unit	0 unit	0 unit			1 unit		100		1		
15.15.02.2.05.04		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe)	5500 buah	137500000	0 buah	0	5500 buah	137500000	5500 buah	137,500,000	0 buah	0	0 buah	0	0	5500 buah	137,500,000	100	100	5500		
15.15.02.2.05.07		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	6 unit	392698600	0 unit		6 unit	392698600	0 unit	37,400,000	0 unit	315,700,000	0 unit		6 unit	33,000,000	6 unit	386,100,000	100	98.32	6	
			Rehab Gedung Uji	1 paket	392698600	0 paket		1 paket		0 paket		1 paket	0 paket	0 paket			1 paket		100		1		
			Upgrading Alat Uji Axle Load Meter	1 unit	392698600	0 unit		1 unit		1 unit		0 unit	0 unit	0 unit			1 unit		100		1		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Trisulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Thn 2021 (%)								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
			Upgrading Alat Uji CO/HC dan Smoke Tester	1 paket	302698500	0 paket		1 paket		1 paket		0 paket		0 paket		0 paket		1 paket	100									
15.15.02.2.05.02		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokter PKB Dasar	2 orang	31115000	0 orang		2 orang	31115000	0 orang	0	2 orang	21.259.000	0 orang	6.302.630	0 orang	0	2 orang	27.361.630	100	87,94							
15.15.02.2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rakayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tertlaksananya pengendalian dan pengawasan saat insidentil	0	3.011.374.200		2.271.245.400	12 bulan	1.379.779.200		17.290.000		21.870.000	21.870.000	21.870.000				267.767.800		78,22							
15.15.02.2.06.04		Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengendalian dan pengawasan saat insidentil (pengawasan haji, pengamanan bau myale, pengawasan pejabot/ tamu daerah, safari Ramadhan, pengamanan lebaran, tahun baru, expo, dan hari-hari besar lainnya)	60 bulan	752843550	48 bulan	567811350	12 bulan	344944800	3 bulan	17.290.000	3 bulan	21.870.000	3 bulan	21.870.000	3 bulan	206.737.800	12 bulan	267.767.800	100	77,63			12	567811617		INF	
			Tertlaksananya pengamanan dan pengawasan event nasional/internasional	hari	752843550	hari		18 hari		0 hari		0 hari		0 hari		0 hari		hari		0							NAN	
			Tertlaksananya pengamanan dan pengawasan event nasional/internasional	18 hari	752843550	hari		18 hari		0 hari		0 hari		0 hari		12 hari		12 hari		67				12			INF	
					752843550					0		0		0		0			0					0			NAN	
15.15.02.2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LAI di Jalan	Tertlaksananya pengamanan dan penerbitan (Patroli LAI)	0	1.426.050.000		1.278.625.800	12 bulan	138.490.000		30.290.000		33.870.000	34.095.000	34.095.000			138.490.000		99,07								
15.15.02.2.08.02		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Patroli LAI, Rawan Pagi, dan Rawan Pasar	60 bulan	1426059000	48 bulan	1278625800	12 bulan	138490000	3 bulan	30.290.000	3 bulan	33.870.000	3 bulan	34.095.000	3 bulan	40.235.000	12 bulan	138.490.000	100	100			12	1278625936		INF	
15.15.02.2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Beroperasinya trayek rintisan	0	24.375.042.900		16.452.342.615	12 bulan	6.993.202.500		18.460.000		19.218.000	2.201.862.000	2.201.862.000			2.319.045.000		33,11								
15.15.02.2.09.02		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Operasional Angkutan Perintis	60 bulan	8125014300	48 bulan	5484114205	12 bulan	2331067500	3 bulan	18.460.000	3 bulan	19.218.000	3 bulan	2.201.862.000	3 bulan	79.505.000	12 bulan	2.319.045.000	100	99,48			12	5484114207		INF	
			Pengawasan (jin Angkutan dan Jalur Lintas Angkutan Baring	60 bulan	8125014300	48 bulan		12 bulan		3 bulan		3 bulan		3 bulan		3 bulan		12 bulan		100				12				
			Pengadaan Sarana Transportasi Darat	9 unit	8125014300	5 unit		4 unit		0 unit		0 unit		3 unit		0 unit		3 unit		75				3				
Rata-rata capaian kinerja (%)																74,72%	100,19%											
Predikat Kinerja																Sedang	Sangat Tinggi											
15.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	0	34.130.406.960		30.648.054.216	0	327.328.800		7.240.000		17.927.500	16.023.000		40.641.700		7240000		2.080.489.901.348								
			Jumlah Perizinan Angkutan Laut	100 Perizinan				100 Perizinan						16.023.000		40.641.700												

Dari Tabel 2.1 di atas dapat dikemukakan beberapa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut:

a. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target yang Direncanakan

Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah direncanakan yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat satu output yang tidak tercapai yaitu penyusunan Buku Profil Perhubungan. Hal ini terjadi karena anggaran kegiatan ini tidak dapat dikeluarkan akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Tim TAPD Kabupaten Lombok Tengah;

2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;

Pada kegiatan ini ada beberapa output yang tidak dapat tercapai yaitu:

- Penyusunan Perbup Pengelolaan PJU. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Tim TAPD Kabupaten Lombok Tengah;
- Pembayaran tagihan listrik PJU hanya dapat dilakukan selama 11 bulan karena kurangnya anggaran akibat adanya kenaikan tarif dasar listrik sebesar 17%.

3. Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan target berupa "Persentase Kendaraan yang Laik Jalan" sebesar 96% hanya dapat tercapai sebesar 86,82% atau mencapai 90,44%. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan lalu lintas dari sisi kondisi kendaraan;
- Masih terbatasnya jumlah alat uji kendaraan bermotor sehingga belum dapat melakukan semua jenis pengujian kendaraan;
- Terbatasnya anggaran untuk melakukan penertiban kendaraan yang belum lulus uji KIR.

4. Pada Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota terdapat beberapa output yang tidak dapat tercapai yaitu:
 - MRLL pada event Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) tidak dapat dilaksanakan karena jadwal event tersebut bersamaan dengan event World SuperBike pada tanggal 11-13 November 2022;
 - Survey V/C Ratio, tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Tim TAPD Kabupaten Lombok Tengah.
5. Pada Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan terdapat target berupa "Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas" sebesar 72% yang hanya dapat terealisasi sebesar 70%. Hal ini terjadi antara lain karena:
 - Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan berlalu-lintas;
 - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan berlalu-lintas;
 - Kurangnya anggaran untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan lalu lintas.
6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota.
Realisasi pada target kegiatan ini yaitu berupa "Persentase Trayek Angkutan Umum yang dinormalisasi" yang ditetapkan sebesar 14% tidak dapat tercapai karena beberapa hal sebagai berikut:
 - Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum;
 - Kurang layaknya armada angkutan umum yang ada;
 - Banyaknya angkutan umum banyak yang beralih fungsi menjadi kendaraan pribadi;
 - Berkembang pesatnya angkutan umum berbasis aplikasi (Grab, Gojek, dsb);
 - Sangat kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan normalisasi trayek.

Tidak terpenuhinya beberapa *output* dan target pada beberapa indikator kegiatan di atas tentu saja berimplikasi pada kurang optimalnya kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal tersebut perlu menjadi catatan penting pada proses perencanaan dan penganggaran di tahun berikutnya.

b. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target yang Direncanakan

Program/kegiatan yang telah memenuhi target yang direncanakan diuraikan pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Program/Kegiatan yang Memenuhi Target yang Direncanakan

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen DPA	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen DPPA	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen LKjIP	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen LKPJ	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen LPPD	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Buku Profil Perhubungan	1 dok	-	0	Tidak memenuhi target
		Dokumen Renja	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen Renstra	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen RKA	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen SPIP	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Laporan Monev	4 dok	4 dok	100	Memenuhi target
	Laporan DAK	5 dok	5 dok	100	Memenuhi	

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
						target
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan administrasi keuangan	12 bl	12 bl	100	Memenuhi target
		Laporan Keuangan	15 dok	15 dok	100	Memenuhi target
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Aset	4 dok	4 dok	100	Memenuhi target
		Laporan Kepegawaian	15 dok	15 dok	100	Memenuhi target
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Laptop	3 unit	3 unit	100	Memenuhi target
		Printer	1 unit	1 unit	100	Memenuhi target
		Kursi Plastik	95 buah	95 buah	100	Memenuhi target
		Peralatan Kebersihan	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Peralatan Listrik dan Elektronik	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Bahan logistik kantor	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Dokumen hasil konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	41 dok	41 dok	100	Memenuhi target
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan toilet kantor dan UPTD PKB	2 unit	2 unit	100	Memenuhi target
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya listrik, telp, air	12 bln	11 bln	91,7	Tidak memenuhi target
		Terbayarnya jasa tukang kebersihan kantor	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya honor tim pengelola keuangan	6 bln	6 bln	100	Memenuhi target
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihara dan berlakunya STNK kendaraan dinas	41 unit	41 unit	100	Memenuhi target

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					
8	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Bahan material PJU	4 paket	4 paket	100	Memenuhi target
		Pembongkaran dan Pemasangan Tiang PJU di Ruas Jalan Kodim-Puyung	71 titik	71 titik	100	Memenuhi target
		Terbayarnya tagihan listrik PJU	12 bln	11 bln	91,7	Tidak memenuhi target
		Terbayarnya honorarium Teknisi PJU	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya honorarium Teknisi Traffic Light	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya honorarium Pengawas Faskes dan PJU di 12 Kecamatan	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya honorarium Teknisi Pemeliharaan Alat Keselamatan Jalan	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Pemeliharaan mobil hidrolis PJU	1 unit	1 unit	100	Memenuhi target
		Pengadaan dan Pemasangan Tiang PJU Galvanis	9 unit	9 unit	100	Memenuhi target
		Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Desa Wisata	6 unit	6 unit	100	Memenuhi target
		Pemeliharaan Traffic Light	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
9	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kuitansi retribusi PKB	120 buku	120 buku	100	Memenuhi target
		Kalibrasi alat uji	6 unit	6 unit	100	Memenuhi target
		Pemeliharaan alat uji	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Pengadaan printer smart card +	1 unit	1 unit	100	Memenuhi target

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
		contactless encoder				target
		Pengadaan RFID	1 unit	1 unit	100	Memenuhi target
		Pengadaan alat listrik	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Pengadaan mesin pemotong rumput	1 unit	1 unit	100	Memenuhi target
		Pengadaan sumur bor	45 m	45 m	100	Memenuhi target
		Pengadaan Mesin Absensi Retina	1 unit	1 unit	100	Memenuhi target
		Pengadaan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor	6000 bh	6000 bh	100	Memenuhi target
		Terbayarnya honorarium Operator Alat Uji dan SIM PKB	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
10	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengendalian dan pengawasan saat insidentil	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		MRLI pada event-event nasional/internasional	6 kl	5 kl	83,3	Memenuhi target
		MRLI penerapan sistem dua arah di Jalan Diponegoro dan Soekarno-Hatta	1 kl	1 kl	100	Memenuhi target
		Pengadaan topi Dishub Wing	152 bh	152 bh	100	Memenuhi target
		Pengadaan jas Hujan Rescue	152 bh	152 bh	100	Memenuhi target
		Terbayarnya honorarium Petugas Pengawasan Saat Insidentil	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Survey V/C Ratio	1 kl	-	0	Tidak memenuhi target
11	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Patroli LLAJ	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya honorarium petugas Patroli	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
		LLAJ				
12	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Sarana Transportasi Darat (DAK)	2 unit	2 unit	100	Memenuhi target
		Pengawasan Ijin Angkutan dan Jalur Lintas Angkutan Barang	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya honorarium Supir Angkutan Perintis	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
III	Program Pengelolaan Pelayaran					
13	Kegiatan Penerbitan ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Perijinan Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayarant	2 kl	2 kl	100	Memenuhi target
		Diklat Kru Kapal	50 org	50 org	100	Memenuhi target
		Patroli keselamatan pelayaran	10 bln	10 bln	100	Memenuhi target
		Pemeliharaan speedboat	2 unit	2 unit	100	Memenuhi target
		Terbayarnya honorarium petugas penertiban dan pengamanan ijin angkutan laut	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target

Sumber: Subbag. Perencanaan dan Keuangan Dishub Kab. Loteng TA. 2022

c. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target yang Direncanakan

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat program/kegiatan yang melebihi target yang direncanakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target yang Direncanakan

No	Program/Kegiatan	Output/ Outcome	Target	Realisasi	%	Ket.
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana keselamatan jalan	48%	52,19%	108,7	Melebihi target
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut	20%	80%	400	Melebihi target

Sumber: Subbag. Perencanaan dan Keuangan Dishub Kab. Loteng TA. 2022

Terlampauinya target pada kedua program tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, target Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan melebihi target yang dianggarkan karena:

- Terdapat pemasangan PJU yang bersumber dari Kementerian Perhubungan sebanyak 70 unit;
- Terdapat pemasangan PJU Tenaga Surya yang bersumber dari Kementerian ESDM sebanyak 35 unit;
- Terdapat pemasangan marka jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah sepanjang 21.610 meter.

Sementara itu dari APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah terdapat penambahan sarana dan prasarana keselamatan jalan berupa:

- Pengadaan dan pemasangan RPPJ Desa Wisata sebanyak 6 buah yang berlokasi di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara;
- Pengadaan dan pemasangan tiang PJU Galvanis sebanyak 9 buah yang berlokasi di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah.

2. Pada Program Pengelolaan Pelayaran dengan target berupa Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut berhasil mencapai realisasi sebesar 400% karena adanya program dari Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Pas Kecil angkutan laut secara gratis.

Dengan terpenuhinya hampir seluruh program/kegiatan yang telah direncanakan serta terdapat indikator-indikator kinerja yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan maka diharapkan hal tersebut dapat berimplikasi pada peningkatan layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah kepada masyarakat dalam memenuhi tujuan dan sasaran kegiatannya seperti yang tertuang pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat

direalisasikan pada tahun 2022 tersebut akan dilakukan pengusulan kembali di tahun mendatang baik melalui usulan APBD maupun APBN.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Pada tahun 2022, pembangunan bidang perhubungan khususnya terkait masalah transportasi diprioritaskan pada tujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Secara umum hasil evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2022 diuraikan pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Indikator Kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian Tahun-		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah daerah rawan kecelakaan			n/a	100	98	96	n/a	100	98	96	
2	VC rasio			0,35	0,34	0,33	0,32	0,35	0,35	0,33	0,32	
3	Persentase sarpras keselamatan jalan			43,91	48,00	55,96	64,20	43,91	52,19	55,96	64,20	
4	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang			6,18	6,88	8,34	9,76	6,18	20,83	22,00	24,00	
5	Persentase sarana dan prasarana terminal yang tersedia			35,29	37,25	39,22	43,14	35,29	37,25	39,22	43,14	
6	Persentase lokasi parkir yang tergarap			50,91	61,82	72,73	83,64	50,91	61,82	72,73	83,64	
7	Persentase kendaraan yang laik jalan			95,00	96,00	97,00	98,00	72,10	90,44	97,00	98,00	

No	Indikator Kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian Tahun-		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
8	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan			20,00	20,00	40,00	40,00	20,00	19,20	40,00	60,00	
9	Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas			70,00	72,00	74,00	76,00	70,00	70,00	72,00	76,00	
10	Persentase trayek angkutan umum yang dinormalisasi			-	14	36	57	-	-	14	36	
11	Persentase penerbitan PAS Kecil angkutan laut			-	20,00	40,00	60,00	-	80,00	90,00	100,00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Masih minimnya sumber daya manusia di Bidang Perhubungan;
2. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat-pusat kegiatan di kecamatan. Permasalahan ini berkaitan dengan tidak beroperasinya sebagian besar trayek yang telah ditetapkan oleh SK Bupati Lombok Tengah dan masih kurangnya pelayanan Terminal Tipe C (Terminal Mujur);
3. Rendahnya *load factor* (faktor muat) penumpang yang menggunakan angkutan umum;
4. Penyediaan fasilitas keselamatan jalan yang masih belum sebanding dengan panjang ruas jalan kabupaten;
5. Belum optimalnya ketersediaan lahan parkir;
6. Angka dan tingkat fatalitas kecelakaan yang masih cukup tinggi;
7. Tidak tertampungnya beberapa kegiatan yang merupakan skala prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada APBD.

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan pelayanannya yaitu:

- a. Tantangan yang dihadapi antara lain:
 - Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang semakin meningkat;
 - Dijadikannya Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Super Prioritas dan adanya event-event internasional pada Pertamina Mandalika International Street Circuit;
 - Meningkatnya rute dan volume penerbangan yang dilayani oleh Bandara Internasional Lombok;
 - Besarnya intensitas penggunaan kendaraan pribadi di Kabupaten Lombok Tengah;

- Rencana penerapan *one gate system* pada pemberangkatan kapal cepat yang melalui dermaga Kuta;
- Pusat aktivitas yang belum merata.

b. Peluang yang ada antara lain:

- Adanya regulasi yang memadai;
- Adanya keterbukaan informasi publik, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Adanya sinergi terkait strategi dan upaya penanganan masalah transportasi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat;

Dari permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi tersebut maka dapat disusun isu-isu strategis yang penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan dan program kegiatan prioritas, yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi yang meliputi:
 - a. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas, terutama pada daerah rawan kecelakaan;
 - b. Kurangnya pengetahuan dan/atau kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas;
 - c. Kurangnya fasilitas keselamatan jalan;
 - d. Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan serta perlunya peningkatan penertiban parkir liar;
 - e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
 - f. Kurangnya kompetensi teknis serta sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung kelancaran pelayanan di bidang perhubungan.
2. Belum optimalnya kualitas layanan angkutan, yang meliputi:

- a. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi serta menurunnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum;
- b. Fasilitas pendukung transportasi (seperti terminal dan shelter) memerlukan penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi;
- c. Semakin berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) di saat menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan Langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat, sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Berikut reviu terhadap Rancangan Awal RKPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah:

Tabel 2.5
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
I	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kab. Lombok Tengah	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	64,2%	37.238.806	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kab. Lombok Tengah	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	64,2%		
1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	9,76%	31.987.460	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	9,76%		Penambahan usulan pada meterisasi PJU di 11 kecamatan dan pengadaan neon box pada tiang PJU pada ruas jalan BIL-Songgong
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	479 buah	31.861.540	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	479 buah		
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpelihara	5 unit	125.920	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpasang	5 unit		
2	Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C	Terminal Mujur	Persentase sarana dan prasarana terminal yang tersedia	43,14%	675.000	Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C	Terminal Mujur	Persentase sarana dan prasarana terminal yang tersedia	43,14%		Penambahan usulan pada penataan Shelter Sengkol
	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terminal Mujur	Jumlah fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas umum yang tersedia	22 buah	675.000	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terminal Mujur	Jumlah fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas umum yang tersedia	22 buah		
3	Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Lombok Tengah	Persentase lokasi parkir yang tergarap	83,64%	1.813.798	Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Lombok Tengah	Persentase lokasi parkir yang tergarap	83,64%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah lokasi parkir yang tergarap	46 lokasi	1.813.798	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah lokasi parkir yang tergarap	46 lokasi		
Jumlah penertiban parkir yang dilaksanakan			12 bln	Jumlah penertiban parkir yang dilaksanakan				12 bln			
Jumlah gembok parkir yang tersedia			10 bh	Jumlah gembok parkir yang tersedia				10 bh			
4	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Persentase kendaraan yang laik jalan	98%	1.604.407	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Persentase kendaraan yang laik jalan	98%		Pengadaan alat uji diusulkan menjadi 2 unit
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang tersedia	10 unit	1.316.462	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang tersedia	10 unit		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor	7000 bh	175.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor	7000 bh		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang terkalibrasi	10 unit	125.945	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang terkalibrasi	10 unit		
5	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	60%	804.046	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	60%		Adanya event-event internasional

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	12 bln	804.046	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	12 bln		
			Jumlah dokumen kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang disusun	27 dok				Jumlah dokumen kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang disusun	27 dok		
			Operasional Forum LLAJ	12 bln				Operasional Forum LLAJ	12 bln		
			Jumlah sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	27 kl				Jumlah sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	27 kl		
6	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Lombok Tengah	Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas	76%	160.760	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Lombok Tengah	Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas	76%		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Lombok Tengah	Jumlah penertiban lalu lintas yang dilaksanakan	12 bln	160.760	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Lombok Tengah	Jumlah penertiban lalu lintas yang dilaksanakan	12 bln		
			Jumlah sosialisasi keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan	5 kl				Jumlah sosialisasi keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan	5 kl		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
7	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase trayek angkutan umum yang dinormalisasi	57%	193.335	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase trayek angkutan umum yang dinormalisasi	57%		Tambahan pengusulan sarana transportasi darat melalui dana DAK
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum yang dilaksanakan	96 kl	193.335	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum yang dilaksanakan	96 kl		
Jumlah sosialisasi angkutan umum yang dilaksanakan			2 kl	Jumlah sosialisasi angkutan umum yang dilaksanakan				2 kl			
Jumlah survey statis-dinamis yang dilaksanakan			-	Jumlah survey statis-dinamis yang dilaksanakan				-			
Jumlah dokumen kajian trayek perdesaan dan trayek perkotaan yang tersusun			1 dok	Jumlah dokumen kajian trayek perdesaan dan trayek perkotaan yang tersusun				1 dok			
Operasional trayek rintisan perkotaan			-	Operasional trayek rintisan perkotaan				-			
				Pengadaan sarana transportasi darat (DAK)				-			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
II	Program Pengelolaan Pelayaran	Kab. Lombok Tengah	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	60%	3.925.481	Program Pengelolaan Pelayaran	Kab. Lombok Tengah	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	60%		Ada penambahan usulan
8	Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Lombok Tengah	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	60%	3.925.481	Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Lombok Tengah	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	60%		pengadaan rambu suar dan penyusunan Perbup Retribusi Jasa Kepelabuhan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah penerbitan PAS Kecil angkutan laut	200 bh	3.925.481	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah penerbitan PAS Kecil angkutan laut	200 bh		
Jumlah sosialisasi keselamatan pelayaran yang dilaksanakan			2 kl					Jumlah bimtek kru kapal yang dilaksanakan (pelatihan operator speedboat)	2 kl		
Jumlah dokumen kajian perairan yang tersusun			1 dok					Jumlah dokumen kajian perairan yang tersusun	1 dok		
								Pembangunan rambu suar	2 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
								Penyusunan Perbup Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan	1 dok		
								Pembangunan pos pengawasan angkutan laut	4 unit		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perhubungan dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan jalan, maka dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya mengacu kepada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai yaitu melalui proses Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten (Forum SKPD) serta penyesuaian dengan kondisi terkini kebutuhan saat perencanaan. Adapun kegiatan yang merupakan usulan dari Kecamatan sebagai hasil proses dari Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 maka Visi dan Misi Kementerian Perhubungan adalah **“Terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”** dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung SDM yang professional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri, dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Adapun Tujuan dari Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Sedangkan Sasaran Strategis dari Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Terwujudnya konektivitas nasional;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi;
4. Meningkatnya kualitas SDM transportasi yang kompeten;
5. Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum;
6. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian;
7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari uraian misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 di atas terdapat point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada point meningkatnya konektivitas, meningkatnya kinerja layanan perhubungan, serta meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan

NO	Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya konektivitas	Rendahnya load factor (faktor muat) penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan angkutan umum masih dibawah standar - Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi - Berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) 	Kebutuhan masyarakat akan transportasi
2	Meningkatnya kinerja layanan perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan - Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi teknis 	Terbatasnya anggaran	Kebutuhan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi topografi jalan - Kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase - Kurangnya fasilitas keselamatan jalan - Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan 	Kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan transportasi
		Kemacetan (pada lokasi dan jam tertentu)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kapasitas jalan - Kurangnya jalan alternatif 	

3.1.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 yaitu **"Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang"**. Visi tersebut diwujudkan melalui 6 (enam) Misi pembangunan.

Dinas Perhubungan Provinsi NTB turut serta dalam mendukung Misi Pertama yaitu **NTB Tangguh dan Mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah.**

Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi NTB yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya konektivitas layanan transportasi
2. Meningkatnya keselamatan transportasi darat

Sedangkan Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan Dinas Perhubungan Provinsi NTB yaitu "Terwujudnya Konektivitas antar Wilayah dan Keselamatan Lalu Lintas Transportasi Publik" adalah:

1. Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk mendukung pariwisata dan event internasional MotoGP;
2. Menyediakan jasa pelayanan sektor transportasi yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Mengembangkan sistem transportasi berkelanjutan yang mengutamakan integrasi antarmoda dan intermodal untuk angkutan umum, jalan kaki, dan sepeda;
4. Menyiapkan regulasi daerah di sektor transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah strategis, dan mengantisipasi isu strategis terkait Covid-19, gender dan disabilitas, kebencanaan, perubahan iklim, dan SDGs.
5. Meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui upaya meningkatkan manajemen keselamatan jalan, meningkatkan jalan berkeselamatan, meningkatkan sarana transportasi yang berkeselamatan, sosialisasi keselamatan bagi pengguna jalan, dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait penangan kecelakaan.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Konektivitas Layanan Transportasi	Rendahnya load factor (faktor muat) penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan angkutan umum masih dibawah standar - Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi - Berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) 	Kebutuhan masyarakat akan transportasi
2	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi topografi jalan - Banyaknya resiko berbahaya pada daerah rawan kecelakaan - Kurangnya fasilitas keselamatan jalan - Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan 	Kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan transportasi
		Kemacetan (pada lokasi dan jam tertentu)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kapasitas jalan - Kurangnya jalan alternatif 	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

3.2.1 Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan merupakan implemementasi/penjabaran Visi-Misi Bupati Lombok Tengah serta telaahan terhadap arah dan kebijakan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan serta Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampe 5 (lima) tahun.

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah merupakan permasalahan pokok bidang perhubungan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan bidang perhubungan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Lombok Tengah, dimana Visi-nya adalah "mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera, bermutu, maju, dan berbudaya" dengan misi-misi sebagai berikut:

1. Merawat akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Mencapai SDM yang cerdas, mandiri, dan unggul;
3. Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat, dan bersih;
- 4. Pembangunan ekonomi yang berkeimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas (*merupakan misi yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah*)**
5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur.

Berdasarkan Visi-Misi Bupati Lombok Tengah, telaahan terhadap Visi-Misi Kementerian Perhubungan dan Visi-Misi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diuraikan di atas, serta dengan mencermati kondisi terkini dan isu-isu strategis yang kemudian dirumuskan dan dianalisa, maka dirumuskanlah Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 2021-2026 yaitu "**meningkatkan keselamatan lalu lintas**" dengan indikator jumlah daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah.

3.2.2 Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Sasaran strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*), dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah **“meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas”** yang diukur dengan VC Rasio (tingkat kejenuhan jalan).

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2023 diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas		Jumlah daerah rawan kecelakaan	100	98	96
2		Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	VC Rasio (tingkat kejenuhan jalan)	0,35	0,33	0,32

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah seperti yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan 2 Program dengan 8 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan prioritas Urusan Perhubungan dalam Rencana Kerja Tahun 2024, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - 2) Kegiatan Pengeloaan Termnal Penumpang Tipe C, dengan Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - 3) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota

- 4) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 5) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - 6) Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - 7) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatan:
- 8) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Selain itu ditetapkan 1 Program dengan 8 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan Penunjang dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- c) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Renstra, dan dengan memperhatikan isu-isu strategis serta arah kebijakan nasional, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang dijabarkan pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan
Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 15 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Dishub Kab. Loteng	B	predikat	8.869.569.791	DAU			9.756.526.770
2 15 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang Tercapai	Dishub Kab. Loteng	100	%	26.354.100	DAU			28.989.510
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dishub Kab. Loteng	5	dok	11.618.700	DAU			12.780.570
		Dokumen RKA		1	dok					
		Dokumen DPA		1	dok					
		Dokumen RKA-P		1	dok					
		Dokumen DPPA		1	dok					
		Dokumen Renja		1	dok					
2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun	Dishub Kab. Loteng	30	dok	14.735.400	DAU			16.208.940
		Dokumen LKJIP		1	dok					
		Dokumen LKPJ		1	dok					
		Dokumen LPPD		1	dok					
		Dokumen Profil Perhubungan		1	dok					
		Dokumen SPIP		1	dok					

1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
						Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi		4	dok						
						Laporan Bulanan		12	dok						
						Laporan Triwulan		4	dok						
						Dokumen Laporan Triwulan dan Tahunan DAK		5	dok						
2	15	01	2.02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD yang ditindaklanjuti	Dishub Kab. Loteng	100	%	3.911.996.269	DAU			4.303.195.896
2	15	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji, Tunjangan Kinerja, dan Insentif Pemungutan Retribusi	Dishub Kab. Loteng	1	tahun	3.887.666.659	DAU			4.276.433.325
							Gaji Pokok ASN		1	tahun					
							Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja		1	tahun					
							Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (Insentif Pemungutan Retribusi)		1	tahun					
2	15	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Dishub Kab. Loteng	15	dok	24.329.610	DAU			26.762.571
							Laporan Keuangan Bulanan		12	dok					
							Laporan Keuangan Semesteran		2	dok					
							Laporan Keuangan Akhir Tahun		1	dok					
2	15	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase validasi data aset OPD	Dishub Kab. Loteng	100	%	10.671.480	DAU			11.738.628
2	15	01	2.03	04		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset yang tersusun	Dishub Kab. Loteng	5	dok	10.671.480	DAU			11.738.628

1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
						Laporan Aset Triwulan			4	dok					
						Laporan Aset Tahunan			1	dok					
2	15	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan capaian kinerja lebih dari 80%	Dishub Kab. Loteng	100	%	369.782.300	DAU			321.960.530
2	15	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas lapangan yang tersedia	Dishub Kab. Loteng	160	stel	160.000.000	DAU			91.200.000
							Jumlah pakaian dinas lapangan dan atribut yang tersedia		160	stel	160.000.000				91.200.000
2	15	01	2.05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan kepegawaian yang tersusun	Dishub Kab. Loteng	14	dok	16.901.700	DAU			18.591.870
							Dokumen Analisis Jabatan		1	dok					
							Dokumen Kepegawaian		12	dok					
							Dokumen SKP		1	dok					
2	15	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis	Luar Daerah	6	org	192.880.600	DAU			212.168.660
							Diklat PKB Lanjutan		2	ok	37.662.900				
							Diklat PKB Dasar		3	ok	112.988.700				
							Diklat PPNS		1	ok	42.229.000				
2	15	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP	Dishub Kab. Loteng	100	%	553.083.872	DAU			608.392.259
2	15	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Dishub Kab. Loteng	16	paket	412.287.872	DAU			453.516.659
							Laptop		5	buah	50.000.000				
							Printer		5	buah	25.946.000				
							ATK		1	paket	36.716.355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan dan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk kepentingan rapat dan tamu dinas	Dishub Kab. Loteng	1000	ok	35.000.000	DAU				38.500.000
						Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu Dinas		1000	ok	35.000.000					
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Luar Daerah	111	ok	105.796.000	DAU				116.375.600
						Perjalanan Dinas Es II		5	ok	43.810.000					
						Perjalanan Dinas Es III		3	ok	21.948.000					
						Perjalanan Dinas Es IV		4	ok	27.168.000					
						Perjalanan Dinas ke Provinsi		99	ok	12.870.000					
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase validasi data aset OPD	Dishub Kab. Loteng	100	%	3.357.142.000	DAU				1.323.620.100
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Dishub Kab. Loteng	16	unit	2.640.000.000	DAU				641.485.900
						Kendaraan Dinas R2 untuk Eselon IV		8	unit	240.000.000					
						Kendaraan Dinas R2 Patwal		6	unit	300.000.000					
						Kendaraan R4 Patwal		1	unit	300.000.000					
						Kendaraan Hidrolik/ Crane PJU		1	unit	1.800.000.000					
2	15	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun		40	m	186.400.000	DAU				184.536.000
						Pembangunan Gudang untuk Perlengkapan PJU dan Rambu-rambu Lalu Lintas		40	m	186.400.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	Dishub Kab. Loteng	3	paket	530.742.000	DAU				497.598.200
						Penataan halaman kantor		700	m	166.242.000					
						Penataan tempat parkir kantor		40	m	186.400.000					
						Pembuatan dinding partisi kantor		650	m2	178.100.000					
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	Dishub Kab. Loteng	100	%	159.179.250	DAU				143.677.738
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa listrik, air, dan internet	Dishub dan UPTD PKB Kab. Loteng	12	bulan	91.151.250	DAU				100.266.375
						Jasa Listrik		45000	kwh	66.015.000					
						Jasa Air		650	m3	4.436.250					
						Jasa Internet		12	bulan	20.700.000					
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan umum kantor	Dishub Kab. Loteng	12	bulan	68.028.000	DAU				49.385.600
						Honorarium PPK		12	ob	25.284.000					
						Honorarium Bendahara Pengeluaran		12	ob	9.156.000					
						Honorarium Bendahara Penerimaan		12	ob	4.788.000					
						Honorarium PTT (SK Bupati)		4	org	24.000.000					
						Honorarium Tenaga Kebersihan		12	ob	4.800.000					
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah				492.032.000	DAU				336.972.900

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang laik pakai	Dishub Kab. Loteng	45	unit	189.772.000	DAU											208.749.200	
						Biaya BBM		3.480	liter	48.372.000													
						Biaya Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		45	unit	31.400.000													
						Biaya Pemeliharaan		45	unit	110.000.000													
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab	Dishub Kab. Loteng	1	paket	302.260.000	DAU											-	
						Rehab Berat Gedung Kantor		70	m2	302.260.000													-
2	15	02			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarpras Keselamatan Jalan	Lombok Tengah	64,2	%	35.238.805.900	DAU & DAK											35.654.642.490	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang	Lombok Tengah	9,76	%	29.987.460.000	DAU											29.919.412.000	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terpasang	Lombok Tengah	479	buah	29.861.540.000	DAU											29.780.900.000	
						Pengadaan dan Pemasangan rambu-rambu Lalu Lintas	2 lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	300	buah	450.000.000												1800	
						Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	2 lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	125	buah (4m)	312.500.000												3000	
						Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Praya	2	paket	700.000.000													
						Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	Praya	12	buah	360.000.000													
						Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Desa Wisata	Desa-desa wisata	40	buah	684.800.000													
						Bahan Material PJU	Dishub Kab. Loteng	1	paket	200.000.000													
						Alat Perlengkapan Teknisi PJU	Dishub Kab. Loteng	1	paket	50.000.000													

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Rehab Gedung Terminal Mujur		1	paket	500.000.000				
					Penataan Shelter Sengkol		1	paket	175.000.000				
2	15	02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap	Kab. Lombok Tengah	83,64	%	1.813.798.000	DAU			1.995.177.800
2	15	02	2.04	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi parkir yang tergarap	Kab. Lombok Tengah	46	lokasi	1.813.798.000	DAU			1.995.177.800
					BBM Penertiban Parkir		12	bulan	26.688.000				
					Makan Minum Penertiban Parkir		12	bulan	36.000.000				
					Jasa Tukang Petugas Penertiban Parkir		12	org	57.600.000				
					Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penertiban Parkir		4	org	45.600.000				
					ATK		1	paket	2.110.000				
					Pengadaan Rompi Parkir		100	buah	18.000.000				
					Pengadaan Mobil Derek		1	unit	1.500.000.000				
					Pengadaan Gembok Parkir		10	buah	50.000.000				
					Penyusunan Perbup Penindakan Parkir		1	dok	10.000.000				
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka penertiban parkir		12	bln	37.800.000				
					Pelatihan/Pembinaan Juru Parkir		2	kl	10.000.000				
					Survey titik parkir		12	kec	20.000.000				
2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	UPTD PKB	98	%	1.604.407.400	DAU			1.723.598.140

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang tersedia	UPTD PKB	10	paket	1.316.462.400	DAU			1.448.108.640
						Pembangunan Tembok Keliling		300	m	616.064.400				
						Pembangunan Gedung Pelayanan PKB		1	unit	500.000.000				
						Pengadaan Printer Smart Card		1	unit	40.000.000				
						Pengadaan alat listrik		1	paket	3.718.000				
						Pengadaan alat kebersihan		1	paket	2.000.000				
						Pengadaan bahan komputer		1	paket	12.000.000				
						Belanja makanan dan minuman kegiatan PKB		12	bln	27.000.000				
						Belanja BBM kegiatan PKB		12	bln	12.000.000				
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah dalam rangka OPGAB ke Kecamatan		12	bln	10.080.000				
						Belanja Jasa Tukang Operator PKB dan SIM PKB		7	org	33.600.000				
						Biaya kegiatan sosialisasi PKB		5	kali	50.000.000				
						Pengadaan ATK		1	paket	10.000.000				
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor yang tersedia	UPTD PKB	7000	buah	175.000.000	DAU			151.250.000

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pengadaan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe)		7000	buah	175.000.000				
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji kendaraan yang terkalibrasi	UPTD PKB	10	unit	112.945.000	DAU			124.239.500
						Biaya Kalibrasi		10	unit	10.000.000				
						Biaya Pemeliharaan Alat Uji		1	paket	100.000.000				
						Biaya makanan dan minuman kegiatan kalibrasi alat uji		5	hr	2.250.000				
						Biaya BBM dalam rangka uji kalibrasi		50	ltr	695.000				
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	Kab. Lombok Tengah	60	%	804.046.000	DAU			884.450.600
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	Kab. Lombok Tengah	12	dok	804.046.000	DAU			884.450.600
						BBM Pengawasan Saat Insidentil dan Event Nasional/Internasional		12	bulan	96.466.000				
						Makan Minum Pengawasan Saat Insidentil dan Event Nasional/Internasional		12	bulan	320.580.000				
						Pengadaan senter lalu lintas		100	bh	10.000.000				
						Pengadaan hand counter dan lainnya untuk Survey V/C Ratio		1	paket	2.000.000				
						Pengadaan Pos Jaga Portable		10	unit	300.000.000				

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Baliho dan banner untuk Event Nasional/ Internasional		5	bh	3.000.000				
					Jasa Tukang Petugas Pengawasan Saat Insidentil		15	org	72.000.000				
2	15	02	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas	Kab. Lombok Tengah	76	%	160.760.000				176.836.000
2	15	02	2.08	02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penertiban lalu lintas yang dilaksanakan	Kab. Lombok Tengah	120	kl	160.760.000				176.836.000
					BBM Patroli LLAJ		12	bulan	18.360.000				
					Makan Minum Patroli LLAJ		12	bulan	44.400.000				
					Jasa Tukang Petugas Patroli LLAJ		10	org	48.000.000				
					Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas di sekolah-sekolah se-Kab. Loteng		5	kl	50.000.000				
2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Trayek Angkutan Umum yang dinormalisasi	Kab. Lombok Tengah	57	%	193.334.500				212.667.950
2	15	02	2.09	02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum yang dilaksanakan	Kab. Lombok Tengah	96	kali	193.334.500				212.667.950
					BBM Angkutan Perintis dan Penertiban Angkutan		12	bln	40.774.500				
					Makan minum penertiban angkutan		12	bln	17.760.000				
					Honor Tim Ahli untuk Penertiban Angkutan		1	tahun	45.600.000				

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
						Jasa Tukang Sopir Perintis				4	orang	19.200.000											
						Sosialisasi angkutan umum				2	kl	20.000.000											
						Dokumen Kajian Trayek Perdesaan dan Perkotaan				1	dok	50.000.000											
2	15	03				Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penertiban PAS Kecil Angkutan Laut	Kab. Lombok Tengah		60	%	3.925.481.000										167.618.000	
2	15	03	2.02			Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	Kab. Lombok Tengah		60	%	3.925.481.000										167.618.000	
2	15	03	2.02	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	Kab. Lombok Tengah		200	buah	3.925.481.000										167.618.000	
						BBM Operasional Pengawasan Angkutan Laut				12	bln	30.441.000											
						Makan Minum Operasional Pengawasan Angkutan Laut				12	bln	26.040.000											
						Jasa Tukang Penertiban dan Pengawasan Angkutan Laut				12	org	24.000.000											
						Biaya Pemeliharaan Speedboat				2	unit	100.000.000											
						Penyusunan Perbup Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan				1	dok	15.000.000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sosialisasi perijinan angkutan laut dan keselamatan pelayaran		2	kl	20.000.000				
		Pengadaan life jacket		500	bh	50.000.000				
		Pelatihan Operator Speedboat		1	kl	10.000.000				
		Pembangunan Pos Pegawasan Angkutan Laut		4	paket	400.000.000				
		Biaya pemeliharaan dermaga Kuta		1	paket	200.000.000				
		Dokumen kajian perairan		1	dok	50.000.000				
		Pembangunan Rambu Suar		2	paket	3.000.000.000				
TOTAL PAGU						48.033.856.691				45.578.787.260

Praya, 25 Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,



H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691122 199203 1 004

BAB V

PENUTUP

Demikian Ranwal Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024. Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan terutama pada daerah-daerah rawan kecelakaan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas
2. Perlunya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didukung oleh sarana dan prasarana jalan maupun terminal yang memadai, terutama pada saat gelaran event nasional maupun internasional di KEK Mandalika
3. Perlunya perhatian pada ketersediaan sarana dan prasarana di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terutama untuk persyaratan peningkatan akreditasi dan layanan kepada masyarakat
4. Perlunya Langkah-langkah inovatif dalam menyelesaikan permasalahan transportasi/angkutan umum di Kabupaten Lombok Tengah
5. Pengembangan transportasi laut selain diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir khususnya nelayan dan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk mencapai keberhasilan dari program Rencana Kegiatan ini, maka capaian kinerja hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Praya, 25 Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah,


H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
N.P. 19691122 199203 1 004